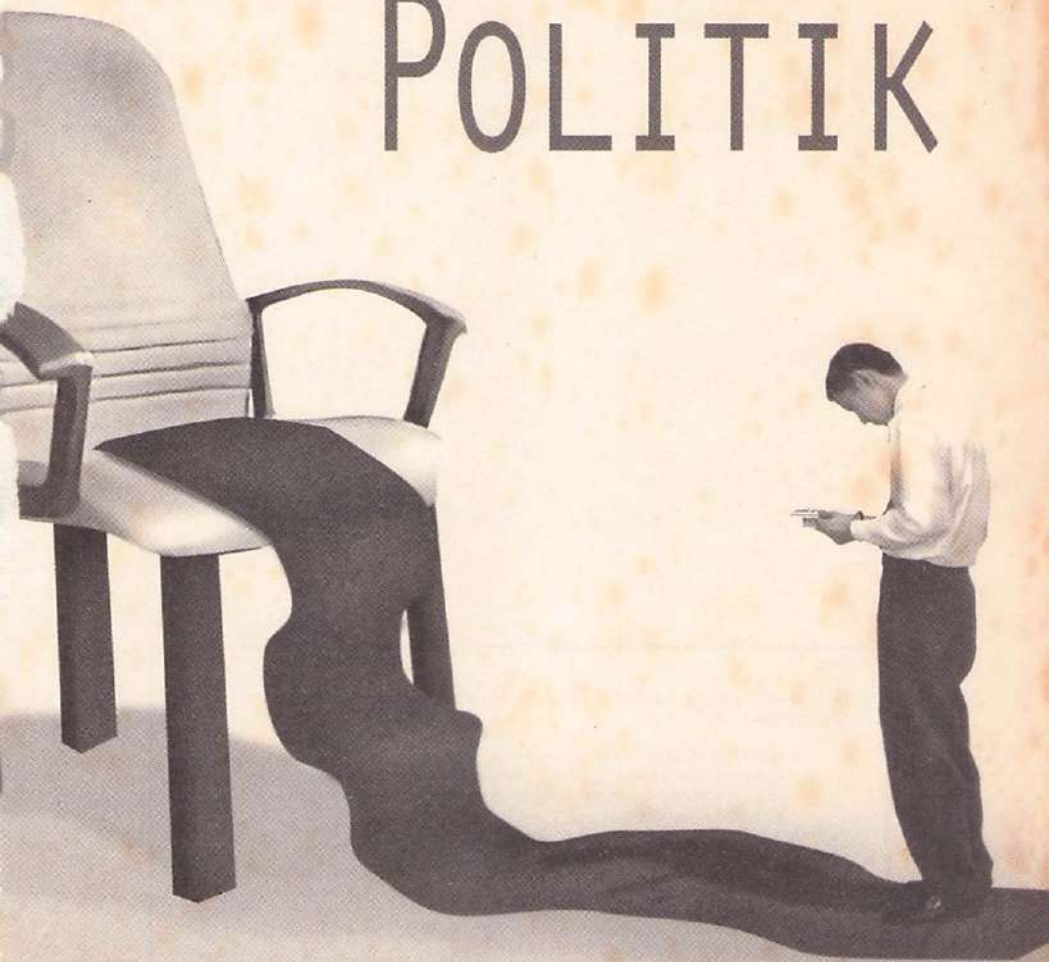


D A S A R - D A S A R

ILMU POLITIK



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D A S A R - D A S A R

ILMU POLITIK



Cholisin M. Si. & Nasiwan M. Si.



PENERBIT OMBAK
www.penerbit-ombak.com

2012

DASAR DASAR ILMU POLITIK
Copyright©Cholisin, M.Si & Nasiwan, M.Si, 2012

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Ombak, 2012
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
www.penerbit-ombak.com

PO.216.02.'12

Penulis: Cholisin, M.Si & Nasiwan, M.Si
Penyunting & Tata Letak: Aditya Pratama
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
DASAR DASAR ILMU POLITIK
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012
xii + 240 hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-7544-03-1

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ~ xi

Bagian Pertama

PENGERTIAN, MAKNA, HAKIKAT DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

- A. PENGERTIAN ILMU POLITIK ~ 1
- B. MAKNA POLITIK DAN ILMU POLITIK ~ 2
 - 1. Makna Politik ~ 2
 - 2. Makna Ilmu Politik ~ 6
- C. HAKIKAT ILMU POLITIK ~ 10
- D. PERKEMBANGAN ILMU POLITIK ~ 11
 - 1. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik secara Umum ~ 11
 - 2. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia ~ 17

Bagian Kedua

ILMU POLITIK SEBAGAI BAGIAN ILMU SOSIAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN ILMU SOSIAL YANG LAIN

- A. ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU DAN BAGIAN ILMU SOSIAL ~ 20
 - 1. Ilmu Politik sebagai Ilmu ~ 20
 - 2. Sasaran Ilmu Politik ~ 21
 - 3. Ruang Lingkup Ilmu Politik ~ 21
 - 4. Pendekatan Ilmu Politik ~ 25
 - 5. Teori Politik ~ 32
- B. HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL YANG LAIN ~ 35
 - 1. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah ~ 35
 - 2. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi ~ 36
 - 3. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum ~ 38
 - 4. Hubungan Ilmu Politik dengan Etika ~ 39
 - 5. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi ~ 39
 - 6. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya ~ 40
 - 7. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi ~ 40
 - 8. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial ~ 41

Bagian Ketiga

KEKUASAAN POLITIK

- A. KEKUASAAN DALAM ARTI UMUM ~ 42
- B. KONSEP KEKUASAAN POLITIK ~ 44
- C. DIMENSI KEKUASAAN POLITIK ~ 47
 - 1. Kekuasaan Potensial dan Aktual ~ 47
 - 2. Kekuasaan dalam Jabatan dan Kekuasaan dalam Pribadi ~ 47
 - 3. Kekuasaan Paksaan dan Konsensual ~ 48
 - 4. Kekuasaan Positif dan Negatif ~ 48
- D. PENDAYAGUNAAN KEKUASAAN POLITIK ~ 48
 - 1. Jumlah dan Distribusi Sumber Daya ~ 49
 - 2. Motivasi untuk Penggunaan Sumber Daya ~ 50
 - 3. Besarnya Kekuasaan sebagai Hasil Penggunaan Sumber Daya ~ 51
- E. DISTRIBUSI KEKUASAAN POLITIK ~ 53
 - 1. Model Elite yang Berkuasa ~ 54
 - 2. Model Pluralis ~ 55
 - 3. Model Populis ~ 56
- F. PENGARUH DALAM KEKUASAAN POLITIK ~ 56

Bagian Keempat

INSTITUSI-INSTITUSI POLITIK

- A. NEGARA SEBAGAI KONSEP POLITIK ~ 59
 - 1. Beberapa Pendapat tentang Negara sebagai Konsep Politik ~ 59
 - 2. Peran Negara ~ 61
 - 3. Legitimasi Negara ~ 69
- B. LEMBAGA LEGISLATIF ~ 67
 - 1. Fungsi Lembaga Legislatif ~ 67
 - 2. Perwakilan Politik dan Perwakilan Fungsional ~ 68
 - 3. Model Perwakilan ~ 69
 - 4. Tanggapan Wakil Terhadap Terwakil ~ 71
- C. LEMBAGA EKSEKUTIF ~ 71
 - 1. Fungsi Eksekutif ~ 71
 - 2. Sistem Kabinet Parlemen dan Presidensial ~ 73
 - 3. Birokrasi ~ 74
- D. LEMBAGA YUDIKATIF ~ 81

Bagian Kelima

DEMOKRASI

- A. KONSEP DEMOKRASI ~ 83
- B. NILAI-NILAI DEMOKRASI ~ 88
- C. VARIAN DEMOKRASI ~ 92
 - 1. Penggolongan demokrasi atas dasar bidang kehidupan ~ 92
 - 2. Penggolongan demokrasi berdasarkan Jaminan Kebebasan dan Persamaan ~ 97
 - 3. Demokrasi Langsung dan Perwakilan ~ 98
 - 4. Penggolongan berdasarkan aliran pemikiran ~ 99
- D. DEMOKRASI PANCASILA ~ 102
- E. DEMOKRATISASI ~ 104
 - 1. Pendekatan Demokratisasi: **modernisasi**, transisi dan struktural ~ 105
 - 2. Pendekatan demokratisasi: *continued authoritarianism*
Instalasi demokrasi, consolidating democracy ~ 106
 - 3. Tipologi Demokratisasi ~ 107
- F. KONSOLIDASI DEMOKRASI ~ 108
- G. DEMOKRATISASI DAN CIVIL SOCIETY ~ 109

Bagian Keenam

PARTAI POLITIK

- A. PENGERTIAN PARTAI POLITIK ~ 111
- B. ASAL-USUL PARTAI POLITIK ~ 111
- C. FUNGSI PARTAI POLITIK ~ 112
- D. TIPOLOGI PARTAI POLITIK ~ 115
 - 1. Tipologi berdasarkan kriteria: Komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan ~ 116
 - 2. Tipologi berdasarkan kriteria: Sumber Dukungan, Organisasi Internal dan Cara-cara Tindakannya ~ 117
 - 3. Tipologi berdasarkan kriteria: Asas dan Orientasi ~ 118
 - 4. Tipologi berdasarkan kriteria: Basis Sosial dan Tujuan ~ 118
- E. SISTEM KEPARTAIAN ~ 119
 - 1. Sistem Kepartaian: Berdasarkan Jumlah ~ 119
 - 2. Sistem Kepartaian berdasarkan: Penggolongan dalam Sistem

- Kepercayaan Integratif dan Kompetitif ~ 120
- 3. Sistem Kepercayaan berdasarkan: Jarak Ideologi ~ 121
- F. PARTAI POLITIK, KELOMPOK KEPENTINGAN DAN KELOMPOK PENEKAN ~ 122
- G. DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK ~ 124

Bagian Ketujuh

PEMILIHAN UMUM

- A. PENGERTIAN PEMILU ~ 126
- B. MAKNA PEMILU ~ 126
 - 1. Perspektif Tujuan ~ 126
 - 2. Perspektif Perkembangan Suatu Negara ~ 127
 - 3. Perspektif Demokrasi Liberal ~ 127
- C. SISTEM PEMILU ~ 127
 - 1. Variabel Pokok Sistem Pemilu ~ 127
 - 2. Sistem Distrik dan Sistem Proporsional ~ 128
 - 3. Sistem Pluralitas Mayoritas ~ 131
 - 4. Sistem Perwakilan Semi Berimbang ~ 132
 - 5. Sistem Representasi Proporsional ~ 133
- D. PEMILU DAN DEMOKRASI ~ 134

Bagian Kedelapan

HAK ASASI MANUSIA

- A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA ~ 137
 - 1. Konsep HAM dalam Perspektif Dimensi Visi ~ 138
 - 2. Konsep HAM dalam Perspektif Dimensi Perkembangan (generasi) ~ 139
- B. IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA ~ 140
 - 1. Pelanggaran HAM secara Dominan oleh Negara ~ 140
 - 2. Kontradiksi antara Universalisme dan Partikularisme ~ 141
 - 3. Dikotomi Individualisme dan Kolektivisme ~ 142

Bagian Kesembilan

PERILAKU POLITIK, PARTISIPASI POLITIK DAN SOSIALISASI POLITIK

- A. PERILAKU POLITIK ~ 144
- B. PARTISIPASI POLITIK ~ 145
- C. PENGGOLONGAN PARTISIPASI POLITIK ~ 147

1. Penggolongan berdasarkan Partisipasi aktif dan partisipasi pasif ~ 147
2. Penggolongan Partisipasi politik dilihat dari dimensi stratifikasi sosial ~ 148
3. Penggolongan Partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku ~ 148
4. Penggolongan Partisipasi politik berdasarkan tinggi-rendahnya kesadaran politik ~ 149
5. Penggolongan partisipasi politik berdasarkan frekuensi dan intensitas ~ 149
6. Penggolongan Partisipasi Politik dalam konvensional dan non konvensional ~ 150

D. PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH ~ 152

E. PARTISIPASI POLITIK DAN SOSIALISASI POLITIK ~ 154

Bagian Kesepuluh

KONFLIK POLITIK DAN PENYELESAIAN KONFLIK

- A. KONSEP KONFLIK POLITIK ~ 158
- B. SUMBER KONFLIK POLITIK ~ 159
- C. PENGGOLONGAN KONFLIK POLITIK ~ 161
- D. PENGATURAN KONFLIK ~ 161
- E. PENYELESAIAN KONFLIK POLITIK ~ 163

Bagian Kesebelas

POLITIK INDONESIA

- A. KEKUATAN POLITIK MILITER ~ 167
- B. KEKUATAN POLITIK PARTAI POLITIK ~ 172
- C. KEKUATAN POLITIK BIROKRASI: MERIT DAN SPOIL SISTEM ~ 179
 1. Birokrasi antara Merit dan Spoil Sistem ~ 180
 2. Perkembangan Birokrasi Menuju Merit System di Eropa Kontinental ~ 182
 3. Perkembangan Birokrasi dengan Prinsip Spoil Sistem di Amerika ~ 186
 4. Antara Netralitas Birokrasi dan Political Appointment ~ 191
- D. KEKUATAN POLITIK ISLAM ~ 195
- E. KEKUATAN POLITIK KELAS MENENGAH ISLAM ~ 197

Bagian Keduabelas**HUBUNGAN INTERNASIONAL**

- A. MAKNA DAN CAKUPAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ~ 205
 - 1. Tujuan Mempelajari Hubungan Internasional ~ 209
 - 2. Perspektif dalam Hubungan Internasional ~ 209
 - 3. Elemen-elemen dalam Hubungan Internasional ~ 210
- B. POLITIK INTERNASIONAL ~ 213
- C. ORGANISASI INTERNASIONAL ~ 215
- D. HUKUM INTERNASIONAL ~ 219

Bagian Ketigabelas**PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK**

- A. KONSEP DAN PEMBANGUNAN POLITIK DAN PERUBAHAN POLITIK ~ 221
 - B. TUJUAN PEMBANGUNAN POLITIK ~ 223
 - C. PENDEKATAN PEMBANGUNAN POLITIK ~ 223
 - D. PENYEBAB PERUBAHAN POLITIK ~ 224
 - E. OBJEK PERUBAHAN POLITIK ~ 225
 - E. TIPOLOGI PERUBAHAN POLITIK ~ 226
- DAFTAR PUSTAKA ~ 228**
- TENTANG PENULIS ~ 236**

PENGANTAR PENULIS

Penerbitan buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ini, bermula dari diktat untuk memperlancar perkuliahan mata kuliah dasar-dasar ilmu politik, dimana penulis sebagai pengampu dan koordinator di FISE UNY. Kemudian ketika ada program kemitraan antara FISE UNY (sekarang menjadi FIS dan FE), FIS-UNNES, FIS-UNESA, dan FKIP-UNS Jurusan IPS, penulis menawarkan diktat penulis untuk dijadikan sebagai modal awal untuk dikembangkan menjadi buku yang dapat menjadi salah satu referensi mata kuliah dasar-dasar ilmu politik di Perguruan Tinggi kemitraan tersebut. Tawaran penulis ternyata mendapatkan sambutan positif, kemudian penulis mengajak kolega penulis Nasiwan, M.Si untuk melengkapi beberapa bab yang belum sempat ditulis dan meminta masukkan kepada kolega di FIS UNESA: Sudarsih, M.Si dan Agus Satmoko, S.Fil, M.Si; kolega di FIS-UNNES: Puji Lestari, M.Si, dan Ngabiyanto, M.Si; kolega di FKIP UNS Jurusan IPS : Suyatno, M.Pd dan Hendri Nuryadi, S.Pd; kolega di FISE UNY: Nur Hidayah, M.Si, Lena Satlita, M.Si, dan Ita Mutiara Dewi, SIP.

Kemudian dalam upaya untuk memperluas jangkauan dan menyesuaikan dengan tuntutan pemahaman tentang dasar-dasar ilmu politik yang lebih komprehensif, serta pemutahiran konsep dan teori maka buku ini ditulis dalam versi baru. Versi baru pada dasarnya merupakan upaya penyempurnaan baik dari aspek isi, analisis serta konstruksi penyusunan bab-babnya. Dengan demikian buku ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang dapat mempermudah dan memperkaya usaha memahami ilmu politik beserta penerapannya.

Untuk itu, melalui kata pengantar ini perkenankan kami mengucapkan terimakasih kepada kolega di Jurusan PKn dan Hukum

FIS UNY, kolega pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik di FIS UNY dan FE UNY serta FIS dan FKIP di Perguruan Tinggi kemitraan, atas masukkan, kerjasama dan dukungannya sehingga buku ini dapat disusun. Terimakasih juga disampaikan kepada Penerbit Ombak atas ketersediannya untuk menerbitkan buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufiq dan hidayahNya kepada kita, sehingga kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat kita nikmati dalam realitas kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kami senantiasa mengharapkan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan buku ini di masa-masa mendatang. Terima kasih.

Yogyakarta,
Kampus Karangmalang 29 Januari 2012

Penulis

BAGIAN PERTAMA PENGERTIAN, MAKNA, HAKIKAT DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

A. PENGERTIAN ILMU POLITIK

Untuk memahami pengertian atau definisi ilmu politik, kata kuncinya pada pemahaman tentang pengertian politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani), yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti *polities* (warga negara), *politikos* (kewarganegaraan atau *civics*) dan *politike tehne* (kemahiran politik) dan *politike episteme* (ilmu politik).

Secara terminologi, politik (*politics*) dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya, Laswell (1950, dalam Goodin; Klingemann, Dieter, 1996: 8) memberikan pengertian secara klasik (*classic formulation*) tentang politik, yaitu "*Politics as who gets what, when and how*". Miriam Budiardjo (1977: 8) mengartikan politik yaitu bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengertian yang lebih komprehensif tentang politik dikemukakan Ramlan Surbakti, (1992: 10-11) yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan pengertian politik di atas, maka pengertian ilmu politik dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama.